

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERKAIT KAWASAN TANPA
ROKOK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANANDA HAFILAH
2010112054

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Yunita Sofyan, S.H., M.H.
Henny Andriani, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 21/PK-V/II/2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak kesehatan terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Padang sebagai upaya perlindungan hak kesehatan masyarakat. Pentingnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perokok dan dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat, serta adanya mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan menerapkan KTR. Rumusan masalah yang diangkat meliputi 1. Bagaimana Pemenuhan Pemerintah Kota Padang terkait kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan? dan 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja, observasi langsung, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan KTR telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari masyarakat dan kurangnya pengawasan yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan KTR meliputi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, budaya, serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Minimnya infrastruktur pendukung dan keterbatasan sumber daya dalam pengawasan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya sosialisasi, edukasi, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ini.

